


buku obor

clifford geertz

INVOLUSI PERTANIAN

Proses Perubahan Ekologi
di Indonesia

AAN DIGITAL
ALTENG
5 Palangka Raya

tan untuk
a Penelitian Sosiologi Pedesaan
Pertanian Bogor dan
Obor, Jakarta.

bhratara karya aksara

620
GEE
1

INVOLUSI PERTANIAN

No. Induk	70/116/110
Tgl. Terima	27/02/110
Beli/Hadiah/Sumbangan	B
Nomor Buku	620
Copy Ke	

PROSES PERUBAHAN EKOLOGI

DI INDONESIA

Oleh Clifford Geertz

Diterjemahkan oleh S. Supomo

diperiksa oleh Ir. Suleiman Krisnandhi M.Sc.

Kata Pengantar : Prof. Ir. Sajogyo

620
GEE
1

BHRATARA K.A. — 1976 — JAKARTA
Jln. Oto Iskandardinata III/29 — telp. 81858

INVOLUSI PERTANIAN

No. Induk	
Tgl. Terbit	
Bel. Habis / Sumbangan	
Waktu Buku	
Copy Ke	

PROSES PERUBAHAN EKOSISTEM

DI INDONESIA

Clifford Geertz, *Involusi Pertanian*.

Diterbitkan dengan izin University of California Press dan pengarang. Diterjemahkan oleh Supomo dari "Agriculture Involution", sixth printing 1974. Copyright terjemahan dan kata pengantar: Obor, Jl. Cemara 6 Jakarta. Terjemahan dan penerbitan ini dimungkinkan berkat bantuan Ford Foundation.

Seperti halnya perkembangan suatu penyakit itu menunjukkan kehidupan rahasia tubuh manusia kepada seorang dokter, maka perkembangan malapetaka yang besar memberikan keterangan yang berharga mengenai sifat dan hakekat masyarakat yang menderita bencana itu kepada seorang sejarawan.

MARC BLOCH

PRAKATA

Penelitian antardisiplin selalu merupakan soal untung-untungan. Seringkali hasilnya adalah serangkaian artikel atau monograf yang terpisah-pisah tanpa thema yang dengan jelas merangkaiannya. Apabila penelitian atardisiplin itu ditrapkan pada kawasan politik atau geografi seperti Indonesia, misalnya, maka terkandung bahaya bahwa satu-satunya ciri bersama dari karya yang dihasilkan oleh berbagai disiplin yang berbeda-beda itu adalah batas ruang semata-mata. Oleh karena itu, apabila sumbangan dari berbagai disiplin pada studi mengenai suatu kawasan tertentu menghasilkan sintesa yang sejati, maka hasilnya akan sangat menarik perhatian. Sintesa semacam itu nampaknya telah muncul sebagai hasil kerja yang dilaksanakan di bawah naungan panji-panji Massachusetts Institute of Technology, Center for International Studies.

Penelitian mengenai Indonesia yang dilakukan di Center itu dapat dipisahkan menjadi dua kategori besar: kerja Proyek Indonesia (Indonesia Project) -- yang saya pimpin -- yang merupakan salah satu dari empat tugas utama Program Perkembangan Ekonomi dan Politik (Economic and Political Development Program); dan Regu Lapangan Indonesia (Indonesia Field Team) -- yang dipimpin oleh Rufus Hendon -- yang salah seorang anggotanya adalah Clifford Geertz, penulis studi ini. Kerja lapangan kedua proyek itu telah dilakukan dalam periode 1952-1959, dan terutama dipusatkan dalam separoh pertama periode tersebut. Selama tahap penulisan -- yang dimulai pada separoh kedua periode itu, dan baru sekarang hampir selesai -- telah diadakan diskusi-diskusi yang kurang lebih kontinu di antara kedua regu itu pada umumnya, dan antara Dr. Geertz dengan saya sendiri pada khususnya.

Tetapi Proyek Indonesia M.I.T. itu bagaimanapun juga adalah sesuatu yang ikatannya sangat longgar, yang komposisinya berubah-

robah dari tahun ke tahun. Proyek itu lebih merupakan "komunitas yang ketat" dan dipimpin secara terpusat. Dan memang hanya saya-lah satu-satunya orang yang terus-menerus menerima gaji selama lima tahun -- masa hidup yang resmi dari proyek itu. Akan tetapi, pada waktu kebanyakan dari mereka yang ada sangkut-pautnya dengan proyek itu berkumpul bersama untuk mengadakan diskusi selama beberapa hari, beberapa saat sebelum proyek itu secara resmi diakhiri, maka ternyata bahwa kami bersama-sama telah sampai pada suatu pandangan yang terhimpun utuh mengenai Indonesia dengan segala masalahnya. Ketika berbagai kepingan gambar diletakkan bersama-sama, maka kepingan-kepingan itu saling bersesuaian seperti bagian-bagian dari teka-teki jig-saw. Dengan mempergunakan metode disiplin kami sendiri-sendiri -- dengan kecenderungan untuk melintasi batas masing-masing disiplin -- kami tiba pada suatu kerangka analisa yang pada dasarnya sama, dan juga pada suatu konsep umum yang sama mengenai tugas yang terbentang di hadapan bangsa Indonesia apabila mereka hendak mewujudkan harapan yang tinggi dari revolusi mereka.

Versi ahli antropologi dari gambar tersebut terpapar secara lebih terang di dalam karya Dr. Geertz yang sekarang ini daripada di dalam kedua karyanya yang terdahulu -- yang pertama mengenai agama di Jawa, yang lain membandingkan kepengusahaan di Bali dan Jawa tengah-timur.* Yang pertama lebih dekat pada ruang lingkup dan metode antropologi yang tradisional, walaupun minat terhadap kepengusahaan dan pembangunan ekonomi telah mulai kelihatan. Minat ini lebih nampak nyata dalam bukunya yang kedua. Akan tetapi karyanya yang sekarang ini tiada lain adalah sejarah sosial-ekonomi Jawa, yang secara mendalam menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihayati oleh Indonesia Merdeka untuk memulai take-off ke pertumbuhan ekonomi yang melanjut (sustained economic growth), setelah mengalami tingkat kehidupan yang statis selama penjajahan Belanda.

Barangkali akan dapat memudahkan para pembaca untuk menempatkan karya terakhir Dr. Geertz mengenai Indonesia ini ke dalam jalinan yang lebih luas apabila di sini dipaparkan secara

* Yang pertama adalah *The Religion of Java* (lihat Geertz, 1960).

Yang kedua, *Peddlers and Princes* (1963), telah diterjemahkan oleh S. Supomo, dan diterbitkan dalam seri Buku Obor (1973). (Pent.)

singkat garis besar tesis bersama dari para ahli ekonomi, ilmu politik, sejarah, sosiologi, antropologi, dan geografi yang ada sangkut-pautnya dengan usaha kami di bidang Indonesia itu dalam bentuk kata pengantar. Kata-kata yang saya pergunakan di sini adalah kata-kata saya sendiri--dan saya tak bermaksud melibatkan anggota kelompok yang lain pada kata-kata saya ini; tetapi saya telah mencoba menyampaikan sedekat mungkin pada sudut pandangan bersama yang diungkapkan dalam kesempatan-kesempatan yang kami peroleh pada waktu-waktu kami mengadakan pertemuan-pertemuan tersebut di atas.

Di Indonesia diperlukan suatu "dorongan besar", bukan hanya dari sudut pandangan ekonomi, tetapi juga dari segi politik dan sosiologi. Di dalam sejarah setiap negara agaknya ada suatu "momen optimal" untuk memulai perkembangan, suatu masa yang singkat waktu faktor-faktor sosiologi, politik, dan ekonomi bergabung menyediakan iklim yang luar biasa baiknya bagi take-off ke pertumbuhan ekonomi. Kalau momen optimal semacam itu lewat begitu saja tak dipergunakan, maka mungkin diperlukan beberapa angkatan lagi untuk menghasilkan serangkaian kondisi baik yang serupa. Dalam bentuknya yang paling sederhana, tesis itu kedengarannya seperti suatu ungkapan yang telah usang, yakni: take-off itu paling mungkin akan terjadi apabila tumbuhnya golongan pengusaha pribumi terjadi serempak dengan munculnya golongan elite politik yang memiliki kekuasaan dan kemauan untuk menyediakan kerangka kebijaksanaan yang cocok untuk mempergunakan bakat kepengusahaan itu -- baik dalam sektor pemerintah maupun swasta. Namun sebagai suatu bimbingan untuk membuat analisa historis -- dan bahkan juga prognosis -- tesis tersebut kami pandang berguna.

Sejarah Jawa kelihatannya merupakan serangkaian kisah yang berulang-ulang terjadi tentang penumpasan golongan pengusaha yang baru muncul oleh suatu golongan elite politik yang pada dasarnya memusuhinya. Boleh jadi perdagangan Jawa itu memang tidak dapat berkembang karena dirintangi oleh orang Portugis. Dan harapan yang mungkin ada pada kerajaan Mataram untuk menyatukan Indonesia -- sedikit banyak sampai pada taraf yang pernah dicapai oleh, misalnya, kerajaan Majapahit dua abad sebelumnya -- jelas sudah dibinasakan oleh Kompeni Dagang Hindia Timur (VOC) dengan kekerasan.

Kira-kira pada tahun 1850, oleh karena dorongan dari Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dan gelombang pertama pemukiman orang Belanda serta perusahaan perkebunan Belanda, muncul lagi-lah "take-off" taraf permulaan. Pemukiman Belanda itu juga mengawali membubungnya jumlah penduduk; tetapi ada alasan untuk percaya bahwa, seandainya golongan baru pengusaha Jawa itu mendapat kebebasan bergerak, mereka akan menyebabkan kenaikan produktifitas dan perobahan struktur serta sikap sosial yang, bagaimanapun juga, akan memungkinkan kenaikan kontinu dalam pendapatan per kapita. Celaknya, golongan elite politik yang efektif pada waktu itu adalah pegawai-pegawai pemerintah kolonial Belanda, dan kebijaksanaan pemerintah kolonial pada waktu itu tidak diarahkan untuk mendorong bentuk perkembangan semacam itu. Ada beberapa bukti -- meskipun tidak terlalu jelas -- bahwa malaise besar tahun 1930-an, yang menyebabkan mundurnya perusahaan Belanda, telah memberikan injeksi dorongan terakhir pada ekspor karet dan industri Jawa. Di lain pihak, malaise itu telah mematikan segala usaha Jawa di bidang gula yang masih hidup pada waktu itu. Potensi yang masih ada pada masyarakat Jawa untuk membangkitkan keserempakan antara kepemimpinan politik dan ekonomi yang diperlukan untuk take-off semacam itu pada akhirnya telah hancur oleh perang (dunia kedua), pendudukan Jepang, revolusi, dan kekacauan politik yang merupakan buntutnya.

Sementara itu -- meskipun pemerintah kolonial itu menjalankan politik "tak campur tangan" -- semakin intensifnya aktivitas ekonomi Belanda di Jawa telah menyebabkan makin hilangnya kehidupan tradisional dari masyarakat Jawa. Ketika kaum bangsawan Jawa, yang gagal dalam usahanya untuk melebarkan kepemimpinan mereka ke bidang ekonomi, mengundurkan diri kembali ke dalam tradisi Jawa -- dengan perkecualian beberapa orang mendapat pendidikan Barat dan mencari jalan ke luar bagi bakat dan ambisi mereka di bidang politik -- maka mereka itu hanyalah menjalankan ajaran-ajaran yang hampa belaka. Masyarakat Jawa tradisional itu sudah tak ada lagi. Karena itulah maka satu-satunya kepemimpinan yang dapat membangkitkan pengikut *massa* di Jawa dalam tahun akhir-akhir ini adalah kepemimpinan keyakinan -- Komunis atau nasionalis yang ekstrim -- yang sama sekali tidak ada, atau sedikit saja, sangkut-pautnya dengan tradisi Jawa. Tetapi, walaupun kaum Komunis dan nasionalis itu memberikan kepemimpinan politik.

namun pada tahap sekarang ini mereka itu tidak memberikan kepemimpinan ekonomi atau kepengusahaan -- bahkan tindakan dan sikap mereka itu adalah sedemikian rupa sehingga justru menghambat pertumbuhan aktivitas kepengusahaan.

Di bagian lain dari Indonesia pengaruh Belanda datang jauh lebih kemudian, terbatas dalam jangka waktu beberapa dasawarsa saja, dan efeknya tak begitu meluas maupun mendalam seperti halnya di Jawa. Masyarakat-masyarakat di Sumatra Utara (Batak), Sumatra Tengah, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan (Dayak), tidak begitu mengalami proses detradisionalisasi karena hubungannya dengan Belanda itu. Akibatnya, mereka itu mempunyai kesempatan untuk bergerak menurut dinamika kebudayaan mereka sendiri, yang dirangsang oleh kebebasan yang datang bersama dengan revolusi. Masyarakat-masyarakat itu telah mengembangkan kelompok pengusaha pribumi mereka masing-masing, beberapa di antaranya -- terutama Batak dan Minangkabau -- bahkan memberikan pimpinan ekonomi di Jawa maupun di daerahnya sendiri. Tambahan pula, mereka itu -- sekali lagi, terutama Batak dan Minangkabau -- telah memberikan kepemimpinan politik yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah mereka, baik di atas panggung politik nasional maupun regional. Di luar Jawa masih ada alasan untuk mengharapkan adanya semacam saling pengaruh antara golongan pengusaha dengan golongan elite yang dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang melanjut. Hal itu bukan hanya karena Luar Jawa mempunyai pola penduduk-sumber-daya yang lebih menguntungkan daripada Jawa -- walaupun hal itu juga ada benarnya -- melainkan juga karena Luar Jawa-lah yang juga dari segi sosiologi merupakan "titik-titik yang tumbuh dan sektor-sektor yang memimpin". Disinilah terletak sebagian dari keterangan mengenai "dualisme" yang sering sekali di singgung-singgung dalam ekonomi Indonesia.

"Dualisme" ini sebagian besar berasal dari bentuk khusus industrialisasi oleh perusahaan asing sesudah perang Napoleon. Sampai kira-kira tahun 1820 seluruh negeri diserahkan pada pertanian rakyat atau pemilik tanah kecil, tanpa perbedaan yang menyolok dalam teknik pertanian dari satu sektor atau satu daerah yang lain. Jumlah penduduk Indonesia pada waktu itu masih kecil -- kurang dari 10 persen dari jumlahnya yang sekarang, yaitu kurang dari 5 juta orang di Jawa dan barangkali 3 juta orang di Luar Jawa.

Karena itu tanah relatif berlebih-lebihan. Tak ada tekanan penduduk secara serius di manapun juga di seluruh negeri, dan walaupun standar kehidupan tidak tinggi, hidup tidak terlampau berat. Belanda pada umumnya sudah merasa puas dengan berdagang dengan orang-orang Indonesia (sebagian besar lewat orang Cina sebagai perantara) dan kemudian mendapatkan hasil-hasil ekspor yang diperoleh secara paksa, tanpa menetap di Indonesia.

Sesudah selingan pendek pemerintahan Inggris selama perang Napoleon, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia lambat laun bergeser ke pertanian perkebunan. Beberapa dasawarsa kemudian, pertambangan, minyak bumi, dan industri pengolahan mulai berkembang. Industrialisasi agaknya telah menaikkan pendapatan *per kapita* orang-orang Indonesia. Akan tetapi, kenaikan itu tidak menyebabkan adanya perbaikan yang permanen dalam standar kehidupan, karena kenaikan itu dengan cepat diimbangi oleh pertumbuhan penduduk yang bertambah cepat. Pendapatan yang lebih tinggi memberi nafkah untuk jumlah penduduk yang lebih besar. Tambahan pula, pergeseran politik itu menyebabkan makin eratnya kontak antara orang-orang Indonesia dengan peradaban Barat: industrialisasi berarti bahwa orang-orang Eropa itu bermukim di Indonesia. Maka dilakukanlah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kesehatan dan memelihara ketentraman dan ketertiban di antara orang-orang Indonesia yang pada masa-masa sebelumnya lebih suka saling berkelahi. Laju kematian turun. Dan kesehatan serta gizi makanan yang lebih baik barangkali juga -- walaupun tak begitu pasti -- meningkatkan laju kesuburan (fertilitas). Bentuk perkembangan ekonomi itu -- yang berpusat pada perkebunan, pertambangan, dan minyak bumi, yang kesemuanya itu menghasilkan bahan mentah ekspor -- lebih menimbulkan *industrialisasi* daripada *urbanisasi*; dan karena itu kekangan atas besar-kecilnya keluarga sebagai akibat dari industrialisasi kota-kota di Eropa dan di Dunia Baru, di Indonesia kurang efektif. Akibatnya ialah bahwa jumlah penduduk seluruhnya naik lebih dari empat kali lipat dalam waktu tiga generasi.

Sektor ekonomi, di mana penanaman modal baru itu dilakukan, sama sekali tak dapat menyerap kenaikan penduduk yang ditimbulkannya, oleh karena cara kerja perkebunan, industri, minyak bumi, dan pertambangan itu semuanya adalah tetap atau boleh padat-tanah; koefisien teknisnya adalah tetap atau boleh di-

anggap tetap. Jumlah penduduk yang meningkat itu mau tidak mau menyebabkan arus-balik ke pertanian rakyat dan industri rumah tangga kecil-kecilan, di mana koefisien teknisnya adalah relatif berubah-ubah, dan kesempatan untuk mendapatkan nafkah di dalam struktur desa masih ada. Tetapi, dengan tenaga kerja yang berlimpah dan modal yang langka -- dan di Jawa juga tanah yang langka -- maka cara kerja di dalam sektor ini juga menjadi sangat padat-karya. (Bahkan di Luar Jawa pun, sekarang tanah yang subur, mudah dibuka, dan dapat digarap tak lagi nampak berlebihan. Dan dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir ini penduduk Luar Jawa juga naik dengan kecepatan yang hampir sama dengan penduduk Jawa dalam abad kesembilan belas). Akhirnya tenaga kerja menjadi berlimpah-limpah (produktivitas marginal jatuh ke nol), dan penduduk yang terus bertambah itu hanya menyebabkan makin langkanya lapangan kerja yang harus dibagi, sehingga menimbulkan pengangguran -- baik setengah pengangguran maupun pengangguran penuh. Pendapatan *per kapita* dalam sektor ini turun kembali ke tingkat "asal dapat hidup" (subsistence).

Kemajuan teknologi terbatas terutama pada sektor padat-modal. Sementara itu, pada sektor padat-karya laju pertumbuhan penduduk itu jauh melebihi pengumpulan modal. Lebih kemudian lagi, aktivitas organisasi buruh dan kebijaksanaan pemerintah telah menetapkan tingkat upah industri yang, walaupun rendah, kadang-kadang terlalu tinggi dalam hubungannya dengan produktivitas karya yang marginal. Situasi ini makin memperbesar kecenderungan untuk sedapat-dapatnya menggunakan cara kerja hemat-karya (labor-saving) di dalam sektor industri. Sebaliknya, di dalam sektor pedesaan tidak ada dorongan bagi golongan-golongan petani perseorangan atau perusahaan kecil untuk memakai cara-cara baru yang hemat-karya tetapi menyerap modal. Teknologi yang dapat menaikkan produktivitas orang per jam tanpa penanaman modal lagi memang masih harus diketemukan. Dorongan bagi para pekerja sebagai *suatu golongan* untuk meningkatkan usahanya juga tidak ada, karena persediaan tenaga kerja itu sudah berlebihan. Jadi di dalam sektor pertanian rakyat dan industri kecil ini cara kerjanya tetap padat-karya, sedangkan tingkat-tingkat teknik, produktivitas orang per jam, dan kesejahteraan ekonomi dan sosial tetap rendah.

Baik aspek ekonomi maupun aspek politik dari masalah ini telah menjadi bertambah sulit lagi pemecahannya oleh adanya ke-

nyataan bahwa kedua sektor itu kurang lebih memang cocok untuk kedua daerah itu: Jawa dan Luar Jawa. Perkembangan perkebunan, pertambangan, dan minyak bumi terutama terjadi di Luar Jawa, khususnya di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Akan tetapi pertumbuhan penduduk yang besar terjadi di Jawa, di mana tanahnya adalah yang paling subur dan paling cocok untuk menghasilkan bahan makanan, dan yang didiami oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Lapangan kerja di bidang industri rumah tangga dan industri kecil yang paling besar jumlahnya juga di Jawa.

Jadi di sinilah kita dapat suatu negeri di mana dua pertiga penduduknya berdesak-desakan di satu pulau yang relatif kecil, pada umumnya bekerja di bidang produksi bahan makanan atau kerajinan tangan yang sederhana dan kegiatan industri kecil-kecilan untuk konsumsi rumah tangga, sedangkan untuk tekstil serta barang-barang konsumsi yang esensiil lainnya masih tergantung pada impor; sementara itu sepertiga penduduk lagi tersebar di wilayah yang sangat luas, di mana terdapat industri besar yang sangat efisien, yang terutama menghasilkan barang-barang ekspor. Dengan adanya perbedaan yang besar dalam kondisi ekonomi dewasa itu, dan juga dalam kemampuan membangkitkan kepemimpinan bagi pertumbuhan ekonomi, maka tidaklah mengherankan apabila terdapat ketegangan dan kepentingan antara Jawa dengan Luar Jawa.

Implikasi-implikasi dari analisa tersebut memang sangat luas. Pertama, hal itu berarti bahwa tuntutan untuk memperbaharui konstitusi ke arah "demokrasi dengan pimpinan" seperti yang diajukan oleh Presiden Sukarno itu memang merupakan tanggapan terhadap masalah yang sungguh-sungguh riil. Pada tahap dewasa itu demokrasi parlementer yang biasa mau tak mau pasti berarti pemerintahan oleh (pulau) Jawa, karena di Jawa diam dua pertiga pemilih. Satu-satunya jalan di mana sekarang ini Jawa dapat memberikan keserempakan antara golongan pengusaha dan elite yang diperlukan itu adalah lewat tumbuhnya partai Komunis dan berdirinya regime Komunis. Tetapi sebaliknya, para pemimpin PRRI juga benar; memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan saja berarti menyediakan lebih banyak anggaran pembangunan ke proyek pemerintah atau swasta di Luar Jawa, melainkan juga berarti memberikan lebih banyak pertanggungjawaban untuk membiayai dan melaksanakan pembangunan di daerah sendiri-sendiri.

Ditinjau dari segi pandangan seperti itu, Rencana Delapan Tahun yang sedang dijalankan waktu itu tidaklah memenuhi syarat. Rencana itu berusaha memberi bentuk yang jelas terhadap konsepsi demokrasi Indonesia dan menetapkan jenis masyarakat yang diharapkan dapat diciptakan dengan rencana tersebut. Jiwa rencana itu dengan tepat dapat dilihat dari pembagiannya atas 8 jilid, 17 bagian, dan 1945 futsal, untuk melambungkan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kepribadian bangsa Indonesia, kata rencana itu, haruslah digali dari kebudayaan tradisional--nyanyian, tari-tarian, wayang, sastra. Sasarannya haruslah "masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila," yaitu kelima saka-guru falsafah sosial dan politik bangsa Indonesia--kebangsaan, peri kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, dan kepercayaan pada Tuhan. Dan masyarakat (baru) itu juga harus merupakan "masyarakat kekeluargaan," yang akan melahirkan kembali semangat organisasi desa pada tingkat nasional.

Batasan "sosialisme a la Indonesia" itu adalah berguna; namun rencana itu sesungguhnya tidaklah mengenai masalah ekonomi yang pokok. Rencana itu sama sekali *tidak* mengharuskan pemerintah menjalankan "usaha minimum." Rencana untuk pemerintah pusat--dan untuk pemerintah daerah atau usaha swasta tak ada rencana yang tegas dan terperinci--pada dasarnya adalah proyeksi dari program yang sudah berjalan di berbagai kementerian. Rencana itu tidak mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu yang *baru*--apalagi yang berani dan penuh daya-khayal--dalam usaha pembangunan. Rencana itu tidak sungguh-sungguh mengikat pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti ucapan selamat tinggal selama-lamanya pada apa yang telah mereka lakukan selama itu. Akibatnya, rencana itu tidak mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan keputusan-keputusan dasar mengenai kebijaksanaan ekonomi yang harus diambil terlebih dahulu sebelum roda pembangunan itu mulai berputar. Sebaliknya, rencana itu memungkinkan pemerintah menunda-nunda pemikiran masalah pembangunan secara sungguh-sungguh serius, sambil menegaskan kepada rakyat dan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka itu sedang "melaksanakan rencana pembangunan."

Pembangunan Indonesia itu akan mahal biayanya. Namun peristiwa-peristiwa tahun 1957 dan 1958, bersama dengan (mandek-

nya) terhentinya pendapatan riil dan membubungnya inflasi, dengan gamblang menunjukkan bahwa apabila bangsa Indonesia hendak mencapai kesatuan dan kemakmuran yang sejati, maka take-off ke arah pertumbuhan ekonomi itu tak mungkin ditangguh-tangguhkan lebih lama lagi.

Aspek yang lebih bersifat ekonomis murni dari sejarah Indonesia dan masalah-masalah yang dihadapinya dewasa ini akan dibahas di dalam buku terakhir dari proyek M.I.T.. Studi Dr. Geertz sekarang ini memberikan kerangka sosio-budaya yang akan mempermudah tugas para ahli ekonomi itu.

BENJAMIN HIGGINS

Berkeley, California, Mei, 1963.

UCAPAN TERIMA KASIH

Monografi ini adalah perluasan dan revisi yang menyeluruh dari bab pertama dari esei programatis saya yang semula, "The Development of the Javanese Economy: A Sosio-Cultural Approach," (perkembangan Ekonomi Jawa: Suatu Pendekatan Sosio-Budaya) yang diterbitkan dalam bentuk ditto oleh Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology dalam tahun 1956 sebagai dokumen C/56-1 di dalam seri Economic Development Program. Saya sangat berterima kasih kepada Center dengan Direktornya, Max Millikan, atas segala bantuan yang telah diberikannya baik pada waktu saya menulis laporan asli tersebut maupun pada waktu saya melakukan kerja lapangan antropologis di Jawa, sebagai bagian dari "Proyek Mojokuto," dalam tahun 1952-1954, di mana sebagian besar dari gagasan dan tafsiran yang dipaparkan di sini secara historis mula-mula dikembangkan.

Penulisan studi yang sekarang ini telah dimungkinkan oleh Committee for the Comparative Study of New Nations, University of Chicago, dan saya berterima kasih kepada Committee itu sebagai keseluruhan, kepada Ketuanya, Edward Shils, dan kepada semua anggota atas kesempatan yang telah diberikannya. Di antara mereka yang telah membaca dan membahas berbagai konsep karya ini adalah: Robert M. Adams, Harold Conklin, Lloyd A. Fallers, Hildred Geertz, Benjamin Higgins, Robert Lay, Morris Janowitz, Kampto Utomo, W.F. Wertheim, dan Aram Yengoyan, dan saya ingin menyatakan penghargaan kami atas bantuan mereka. Lebih-lebih kepada Conklin, Higgins, Kampto Utomo, dan Yengoyan, yang telah memberikan komentar dan kritik yang panjang lebar dan terperinci, yang sebagian besar saya masukkan ke dalam karya saya ini--walaupun mereka itu, tentu saja, tidak turut bertanggungjawab

atas segala tafsiran saya mengenai argumen mereka itu. Saya berhutang budi kepada Donald McVicker yang telah memberikan bantuan dengan tabel dan peta.

Dari segi yang sangat umum, buku ini adalah suatu usaha untuk menetralkan beberapa konsep dan penemuan antropologi sosial pada penafsiran sejarah--dalam hal ini sejarah ekonomi--untuk mempergunakan pengertian-pengertian yang berasal dari analisa mikrososiologis untuk memahami masalah makrososiologis, dan untuk menciptakan saling hubungan yang bermanfaat antara ilmu-ilmu hayat, sosial, dan sejarah. Bagaimanapun pengaruhnya--berhasil baik atau sedikit saja--karya ini atas integrasi perspektif keilmuan yang berbeda-beda itu, saya yakin bahwa untuk memahami secukupnya negara-negara baru dari "dunia ketiga", maka orang perlu untuk terus mengejar "kijang" ilmiah melampaui bidang-bidang akademis yang berpagar rapat di mana margasatwa yang diburu itu kebetulan memasukinya. Dan apapun faedah yang riil dari analisa saya ini, saya berharap bahwa usaha saya ini sekurang-kurangnya akan menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh dengan ekspedisi berburu yang tak segan-segan melintasi tapal batas serupa itu.

C.G.

Chicago, Januari, 1963.



ISI

PRAKATA (Benjamin Higgins)	VII
UCAPAN TERIMA KASIH (C.G.)	XVII
KATA PENGANTAR (Prof. Ir. Sajogyo)	XXI
 I. TITIK TOLAK, MENURUT TEORI DAN FAKTA.	
1. PENDEKATAN EKOLOGIS DALAM ANTROPOLOGI	
Batas-batas Kemampuan Pendekatan Tradisionil.	1
Ekologi Budaya.	6
2. DUA BENTUK EKOSISTEM	13
Indonesia Dalam versus Indonesia Luar.	13
Ladang	16
Sawah	29
 II. PERWUJUDAN POLA YANG TETAP	
3. ZAMAN PURBA	40
4. ZAMAN PENJAJAHAN: LANDASAN	51
VOC	51
Sistem Tanam Paksa	57
5. ZAMAN PENJAJAHAN: MEKAR	91
Sistem Perkebunan Besar	91
Pengembangan Indonesia Luar.....	113

III. WALHASIL

6. PERBANDINGAN DAN HARAPAN	136
Keadaan Dewasa ini	136
Jawa dan Jepang	142
Garis besar Masa Depan	157
DAFTAR PUSTAKA	169
INDEX	179

Peta 1	Indonesia Dalam versus Indonesia Luar	15
Peta 2	Jawa : Topografi	42
Peta 3	Kerajaan-Kerajaan Purba	45
Peta 4	Kawasan-kawasan	46
Peta 5	Jawa : Daerah-Daerah Gula (1920)	80
Peta 6	Pantai Timur Laut Sumatra (Deli dan sekitarnya): Peta Perkebunan	123
Peta 7	Pantai Barat: Pusat dan daerah Perbatasan	130
Grafik 1	Sistem Tanam Paksa	73
Grafik 2	Penduduk Per KM2	139
Tabel 1	Tanah, Penduduk dan Produksi Padi yang khas untuk daerah Gula di Jawa Tahun 1920	78
Tabel 2	Hubungan antara Produksi Padi, Luas Sawah yang di panen, Hasil Padi Per Hektar dan Penduduk di Daerah Gula di Jawa tahun 1920	79
Tabel 3	Siklus Penanam yang khas untuk sawah yang di sewakan ke Perusahaan Gula di Jawa sesudah tahun 1900	97
Tabel 4	Penanaman Palawija di Jawa	102
Tabel 5	Nilai Sembilan Ekspor yang Terkemuka, Jawa versus Luar Jawa 1870 - 1930	114